

**STRATA DAN HIRARKI KEBIJAKAN PUBLIK
DI INDONESIA**

Dosen Pengampu Mata Kuliah:

Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. AP.



KELOMPOK 4

REG D

Anggota :

NOVENDRA DWI PRADANTA	(2316041110)
ERNI SAPITRI	(2316041113)
BERLIA MAHARANI	(2316041120)
INTAN CENDYKIA	(2316041123)
ALDIVA MUKHSIN	(2316041130)
RHIEN SILVI	(2316041137)

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

KEBIJAKAN PUBLIK BERDASARKAN STRATA

Kebijakan publik adalah langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat. Menurut Strata, kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam konteks strata, kebijakan publik merujuk pada bagaimana kebijakan dibagi dan dilaksanakan di berbagai tingkatan pemerintahan yang berbeda, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap level pemerintahan. Di Indonesia, struktur pemerintahan terdiri dari tiga tingkatan penting: pemerintah pusat (nasional), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Setiap tingkatan memiliki tugas dan fungsi yang khusus dalam menyusun dan menjalankan kebijakan publik yang sesuai dengan wilayah kekuasaannya.

1. Kebijakan Umum / Nasional

Kebijakan publik pada tingkat nasional merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kebanyakan kasus, kebijakan ini menangani masalah-masalah penting yang berpengaruh besar terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

Kebijakan nasional meliputi berbagai sektor, seperti hukum, politik, ekonomi, keamanan, dan sosial-budaya.

Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama bagi seluruh kebijakan di tingkat yang lebih rendah seperti provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan ini juga menentukan arah pembangunan nasional serta kebijakan yang penting untuk mencapai tujuan negara.

Contoh Kebijakan:

- **Undang-Undang (UU):** Produk legislatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang Kesehatan, dan UU tentang Pajak.
- **Peraturan Pemerintah (PP):** Aturan yang dibuat untuk melaksanakan undang-undang, misalnya PP tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- **Keputusan Presiden (Keppres):** Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden, seperti penetapan hari libur nasional atau kebijakan strategis nasional tertentu.

2. Kebijakan Pelaksana (Provinsi)

Kebijakan publik di tingkat provinsi merujuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan berlaku di wilayah provinsi tersebut. Kebijakan ini disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan khusus dari setiap provinsi untuk pelaksanaan kebijakan nasional.

Kebijakan di tingkat provinsi mencakup pengelolaan sumber daya alam, perencanaan wilayah, kesehatan, pendidikan, dan transportasi di wilayah provinsi tersebut.

Kebijakan provinsi berperan dalam menerapkan kebijakan nasional dengan lebih detail dan mengatasi masalah khusus di wilayah provinsi tersebut. Di provinsi ada wewenang untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur secara khusus oleh pemerintah pusat, sehingga dapat lebih cepat merespon kebutuhan daerah.

Contoh Kebijakan:

- **Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi):** Produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD Provinsi dan Gubernur, seperti Perda tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- **Peraturan Gubernur (Pergub):** Kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur untuk mengatur pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di tingkat provinsi, misalnya Pergub tentang Pelaksanaan APBD atau Pergub tentang Penanggulangan Bencana.
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi:** Rencana pembangunan untuk lima tahun yang mencakup program-program strategis sesuai dengan kebutuhan dan potensi provinsi.

3. Kebijakan Teknis (Kabupaten/Kota)

Kebijakan publik di tingkat kabupaten/kota merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten atau kota dan berlaku di daerah administratif kabupaten atau kota tersebut. Kebijakan di tingkat kabupaten/kota meliputi berbagai layanan masyarakat seperti pengelolaan sampah, pelayanan kesehatan, pendidikan tingkat dasar, serta penataan lingkungan dan infrastruktur lokal. - Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur dengan lebih detail dan operasional atas urusan-urusan lokal, sehingga memastikan implementasi kebijakan di tingkat terendah dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. Ini kebijakan juga bertujuan untuk

menyelesaikan masalah-masalah khas yang ada, dan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Contoh Kebijakan:

- **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota):** Produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota, seperti Perda tentang Pajak Daerah, Perda tentang Retribusi Daerah, atau Perda tentang Pengelolaan Sampah.
- **Peraturan Bupati/Walikota:** Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, misalnya Peraturan tentang Pelayanan Publik atau Peraturan tentang Pengelolaan Aset Daerah.

Pembagian kebijakan publik menurut tingkatan ini memungkinkan desentralisasi dan otonomi daerah, di mana setiap level pemerintahan berwenang untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang cocok dengan situasi dan kebutuhan wilayahnya. Dengan ini, keputusan dapat dibuat lebih dekat dengan masyarakat untuk merespon masalah-masalah dalam komunitas dengan lebih cepat.

PERBANDINGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA MENURUT HIRARKI

Menurut Bromley, seorang pakar ekonomi dan lingkungan, kebijakan publik merupakan hasil dari sebuah proses rumit di mana berbagai keputusan diambil pada berbagai tingkat. Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, hirarki kebijakan ini bisa dibandingkan dengan model yang dipelopori oleh Bromley. Bromley mengenali tiga tingkatan utama dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yakni kebijakan konstitusional (policy level), kebijakan kolektif (organizational level), dan kebijakan operasional (operational level).

1. Kebijakan Konstitusional (Policy Level)

Kebijakan konstitusional melibatkan aspek yang sangat penting, seperti undang-undang dasar, prinsip hukum yang mendasar, serta aturan yang mengatur bagaimana kekuasaan didistribusikan dan hak-hak warga negara dilindungi. Posisi kebijakan konstitusional berada di puncak hierarki kebijakan, terdiri dari aturan dan prinsip dasar yang menjadi dasar dari sistem hukum dan tata pemerintahan. Kebijakan ini sangat penting karena berdampak besar dan berjangka panjang, karena menentukan jalan serta struktur semua institusi pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara.

Di Indonesia kebijakan konstitusional ditetapkan melalui proses yang sangat formal dan melibatkan banyak pihak. Proses amandemen UUD 1945, misalnya, melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan memerlukan persetujuan mayoritas yang signifikan, mencerminkan pentingnya legitimasi politik dalam menetapkan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan konstitusional tidak hanya memerlukan konsensus politik yang luas tetapi juga berfungsi sebagai acuan yang stabil untuk seluruh kebijakan publik lainnya.

Kebijakan ini cenderung sangat kaku untuk menjaga stabilitas hukum dan pemerintahan, serta untuk memastikan bahwa perubahan hanya dilakukan ketika benar-benar diperlukan dan didukung oleh konsensus nasional.

Contoh Kebijakan Konstitusional di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), amandemennya, dan berbagai undang-undang dasar yang membentuk kerangka hukum dan politik negara. Ini merupakan dasar dari segala bentuk kebijakan. Peraturan ini menetapkan batasan-batasan, hak, dan kewajiban, serta prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh semua kebijakan lain.

2.Kebijakan Kolektif (Organizational Level)

Kebijakan ini mencakup keputusan-keputusan yang diambil oleh badan-badan pemerintah atau institusi lainnya untuk mengatur tindakan-tindakan kolektif dalam masyarakat. Kebijakan ini mengacu pada peraturan yang mengatur interaksi individu atau kelompok dalam masyarakat, termasuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, atau yudikatif.

Kebijakan kolektif lebih rinci daripada kebijakan konstitusional tetapi masih memiliki sifat strategis. Kebijakan ini mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai instrumen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip konstitusional dalam praktik.

Kebijakan kolektif memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat dan membentuk kerangka regulasi yang harus diikuti oleh semua lembaga dan individu. Pengaruh kebijakan kolektif secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat serta menciptakan standar regulasi yang harus diikuti oleh semua lembaga dan individu.

Contoh Kebijakan Kolektif di Indonesia

Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Ini adalah kebijakan yang lebih spesifik dan bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan pada tingkat kebijakan konstitusional

3. Kebijakan Operasional (Operational Level)

Kebijakan operasional adalah kebijakan yang paling konkret dan spesifik, dirancang untuk mengimplementasikan kebijakan kolektif sejalan dengan kegiatan sehari-hari. Dalam bahasa yang lebih santai, kebijakan ini berisi aturan teknis dan administratif yang penting untuk menjalankan undang-undang dan peraturan dalam situasi tertentu.

Dampak dari kebijakan operasional terbatas pada tahap penerapan, namun memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan kolektif dapat dijalankan dengan baik dan efisien. Contohnya, aturan teknis untuk penyaluran bantuan sosial berpengaruh besar pada cara penerimaan bantuan oleh masyarakat.

Keputusan tentang tindakan operasional biasanya dibuat oleh pejabat administrasi atau badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan bersama. Proses ini umumnya lebih pantas dan lebih teknis daripada proses pembuatan undang-undang.

Kebijakan operasional merupakan yang paling fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan yang berubah-ubah. Instansi pemerintah dapat dengan cepat mengubah atau menyesuaikan peraturan teknis untuk menanggapi situasi atau tantangan yang baru muncul.

Contoh kebijakan operasional di Indonesia

Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Kebijakan ini mencakup pedoman teknis, prosedur administratif, dan keputusan operasional yang dibuat oleh lembaga pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang dan peraturan lainnya. Kebijakan ini sering kali sangat spesifik dan berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas harian pemerintah.

KESIMPULAN

Di Indonesia, kebijakan publik memiliki peranan penting dalam menyesuaikan keputusan pemerintah dengan kebutuhan serta kondisi di berbagai tingkat pemerintahan, seperti tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Kebijakan nasional meliputi masalah-masalah penting dan mendasar yang berlaku secara menyeluruh, seperti peraturan undang-undang dan pemerintah, dan menjadi acuan utama bagi kebijakan di tingkat lokal. Di tingkat provinsi, kebijakan lebih tertuju kepada kebutuhan daerah yang lebih detail, mengatur masalah seperti pengelolaan alam dan pelayanan publik yang sesuai dengan keunikan setiap daerah. Di tingkat daerah kabupaten/kota, kebijakan bersifat spesifik dan terkait dengan teknis, difokuskan pada pelaksanaan praktis yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pemisahan kebijakan berdasarkan strata memungkinkan desentralisasi dan otonomi daerah, di mana setiap level pemerintahan memiliki wewenang untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan yang cocok dengan wilayahnya. Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, perlu dilakukan koordinasi yang solid antar berbagai tingkatan pemerintahan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sejalan dan mendukung tujuan pembangunan nasional yang sama.

kebijakan publik di Indonesia terbagi ke dalam tiga level menurut hirarki Bromley: kebijakan konstitusional, kolektif, dan operasional. Kebijakan konstitusional seperti UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam tatanan dan menegaskan prinsip dasar yang kokoh namun sulit dimodifikasi. Kebijakan kolektif, seperti undang-undang, menerapkan konsep konstitusional ke sektor-sektor tertentu dan meskipun lebih dapat disesuaikan, masih memerlukan proses.

Struktur hirarki ini memperkuat desentralisasi dengan memungkinkan penyesuaian kebijakan sesuai dengan keadaan di daerah, namun perlu koordinasi antar tingkat untuk mencapai keselarasan kebijakan nasional, provinsi, dan 7ubli. Keselarasan ini merupakan 7ublic yang sangat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar 7 ublic dalam kebijakan 7ublic sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. (2006). Strata, karakteristik, dan unsur kebijakan publik. Universitas Sriwijaya. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sriwijaya/kebijakan-publik/strata-karakteristik-dan-unsur-kebijakan-publik/24965356>
- Engkus. (2022). Kebijakan Publik: Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi serta Perubahan. PT Kimshafi Alung Cipta.
- Handoyo Eko. (2012). Kebijakan Publik. Jurnal Kebijakan Publik, 14-16.
- Moh. Wildan, H. Y. (n.d.). MENGUKUR KUALITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK (PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL) DENGAN SURVEY KEPUASAN PASIEN. JURNAL KESEHATAN dr. SOEBANDI Vol. 3 No. 2 , 190 - 201.
- Pangestuti, Naniek. 2008. Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran Pada Direktorat Jendral Perlindungan HAM. Tesis. FISIP Universitas Indonesia:Jakarta
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan publik: Pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.